




Media: Tribun Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 08 Maret 2022

Halaman: 5



TRIBUN JOGJA/TANGKAPAN LAYAR

BERDISKUSI - Kepala Kesbangpol Kota Yogya, Budi Santoso, tengah berbicara dala podcast Diaspora "Urgensi Legalitas Ormas" yang diselenggarakan di Studio Tribun Jogja, Senin (7/3).

Kesbangpol Kota Yogya Dorong Ormas Penuhi Legalitas

YOGYA, TRIBUN - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Yogya mendorong seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas) di wilayahnya agar tertib secara administrasi. Mereka meminta aspek legalitas terkait badan hukum dan laporan kegiatan harus sanggup dipenuhi.

Kepala Kesbangpol Kota Yogya, Budi Santoso, menuturkan, sejauh ini, dari 160 ormas yang terdaftar berdiri di Kota Yogya, baru 55 yang sudah berbadan hukum. Setelbihnya, namanya tercantum, namun lembaga, perorangan, hingga kegiatan, cenderung belum diketahui oleh jajarannya di lapangan.

"Kita punya *database* terhadap ormas. Ada tahapannya, berkekuatan hukum dan punya legalitas di Kemenkumham dan Kemendagri. Kemudian, yang belum memiliki itu, kita fasilitasi sesuai kewenangan," katanya, dalam Podcast Diaspora: Urgensi Legalitas Ormas, Senin (7/3).

Sejak 2021 lalu, pihaknya telah menggulirkan berbagai pendekatan, melalui deretan kegiatan. Rananya, untuk membunikan regulasi dengan seminar, *focus group discussion* (FGD), untuk menetapkan kondisi dan kendala ormas dalam memenuhi aspek legalitas tersebut.

"Karena kan ormas memang wajib melaporkan kegiatannya. Barangkali, kita bisa sinergikan dengan program-program yang akan dilaksanakan Pemkot Yogya," urainya.

"Kita punya target, ormas di Kota Yogya ini seluruhnya bisa aktif dan memiliki setidaknya event kemanusiaan secara rutin. Contoh terkecil, donor darah," tambah Budi.

Sementara itu, maraknya sentimen masyarakat terhadap ormas-ormas yang dinilai meresahkan, Budi menandakan, bahwa semua pihak harus melihat garis besarnya. Sebab, prasangka bisa jadi muncul karena kesengajaan ormas, ketidak-sengajaan, hingga terpersepsi oleh publik.

Pakar Hukum, Deasy Widya Sari, menuturkan, masyarakat tak perlu mengkhawatirkan perantai ormas yang sudah terdaftar dan jelas dari aspek legalitasnya. Bukan tanpa alasan, ormas itu, selama ini, selalu mendapat pengawasan dari pemerintah.

"Jadi, masyarakat sebenarnya kalau ada tetangga di kiri kanannya ada ormas yang bermasalah, kalau dia terdaftar dan punya izin resmi, tidak perlu elikhawatirkan, mereka sudah mendapat pembinaan juga kan," katanya.

Terlebih, dalam kasus-kasus yang dijumpai, banyak oknum yang berbuat anarkis mengatasnamakan ormas, sehingga nama perkumpulannya yang tercoreng. Namun, jika hal tersebut benar-benar dilakukan oleh ormas secara ter-sistematis, maka negara pun dipastikan hadir.

"Bisa dibekukan, tidak diperpanjang surat terdapatnya ya, karena setiap lima tahun sekali harus memperpanjang. Di situ, negara hadir. Toh, pembinaan ada," jelasnya. **(aka/ord)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005